



Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Mendukung Pembangunan Desa Pamboborang Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene

Danar Hafidz Adi Wardhana^{1*}, Achmad Fauzi Kusmin², Muhammad Sajidin³, Riady IK⁴

^{1,3,4} Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

² Program Studi Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Achmadfauzi.kusmin@unsulbar.ac.id

Article History:

Naskah Masuk: 15 September 2025;

Revisi: 21 Oktober 2025;

Diterima: 28 November 2025;

Terbit: 30 November 2025

Keywords: Community Service; Institutional Capacity; Sustainable Development; Village Community Institution (LKD); Village Participation.

Abstract: Village Community Institutions (LKD) play a strategic role in supporting village governance and the implementation of community-based development. However, various challenges remain for many LKDs, particularly in terms of institutional capacity, regulatory understanding, and collaboration among stakeholders. This community service activity aims to strengthen the capacity of the LKD of Pamboborang Village, Banggae Sub-District, Majene Regency, in supporting sustainable village development. The activity was conducted through interactive lectures focusing on improving understanding of institutional functions, strategic roles in planning and monitoring development, and the importance of synergy between the LKD, village government, and the community. Participants included LKD members, village officials, and local community representatives. The results showed an increase in participants' understanding of the main duties and functions of LKDs, along with a growing collective awareness of the importance of local institutional roles in sustainable development. This activity serves as a tangible contribution to transforming village governance through institutional empowerment. In the future, follow-up actions such as continuous mentoring and practice-based training will be needed so that LKD institutional capacity can develop systematically and independently.

Abstrak

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) memegang peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi LKD di banyak desa, terutama dalam hal kapasitas kelembagaan, pemahaman regulatif, dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas LKD Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Kegiatan dilakukan melalui metode ceramah interaktif yang difokuskan pada peningkatan pemahaman tentang fungsi kelembagaan, peran strategis dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, serta pentingnya sinergi antara LKD, pemerintah desa, dan masyarakat. Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan perangkat desa, dan elemen masyarakat setempat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta kegiatan terhadap tugas pokok dan fungsi LKD, serta munculnya kesadaran kolektif akan pentingnya peran kelembagaan lokal dalam pembangunan yang berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi kontribusi nyata dalam mendukung transformasi tata kelola desa melalui pendekatan pemberdayaan kelembagaan. Ke depan, diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan dan pelatihan berbasis praktik agar kapasitas kelembagaan LKD dapat berkembang secara sistematis dan mandiri.

Kata kunci: Kapasitas Kelembagaan; Lembaga Kemasyarakatan Desa; Partisipasi Desa; Pembangunan Berkelanjutan; Pengabdian Kepada Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada keseimbangan wilayah dan keadilan sosial. Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, desa menjadi entitas strategis yang memiliki otonomi untuk mengelola sumber daya dan menentukan prioritas pembangunan berbasis kebutuhan lokal (Samaun et al, 2022). Sejalan dengan itu, keberadaan dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sangat vital dalam memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Lembaga Kemasyarakatan Desa, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, PKK, RT/RW, dan lembaga adat, merupakan mitra pemerintah desa yang berfungsi sebagai wahana aspirasi, partisipasi, dan kontrol sosial dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel (Lathifah et al, 2024). Namun, pada praktiknya, masih banyak LKD yang mengalami kelemahan dalam aspek kelembagaan, manajemen organisasi, pemahaman regulasi, serta kapasitas sumber daya manusianya. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas LKD dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan (Laksana & Hamid, 2023).

Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, merupakan salah satu desa yang menunjukkan potensi pengembangan berbasis sumber daya lokal, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun budaya. Desa ini memiliki struktur sosial yang cukup solid dan partisipasi masyarakat yang relatif aktif. Namun demikian, hasil observasi awal dan diskusi dengan pihak pemerintah desa menunjukkan bahwa fungsi-fungsi kelembagaan LKD di desa ini belum berjalan secara optimal (Larisu & Jopang, 2022). Beberapa permasalahan yang mengemuka di antaranya adalah rendahnya pemahaman anggota LKD terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga, minimnya kemampuan dalam merancang dan mengawal program pembangunan, serta kurangnya sinergi antara LKD, pemerintah desa, dan elemen masyarakat lainnya (Asrizal & Zulkarnain, 2020).

Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam regulasi tersebut, desa diberi kewenangan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang diharapkan disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk LKD. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas LKD menjadi sangat mendesak guna menciptakan kelembagaan desa yang kuat, responsif, dan mampu berperan sebagai katalisator pembangunan (Lestari et al, 2023). Pentingnya penguatan kapasitas

kelembagaan ini juga sejalan dengan pendekatan *Community Based Development* (CBD), yang menekankan pentingnya pemberdayaan aktor-aktor lokal sebagai subjek pembangunan. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga pelaku utama yang memiliki daya tawar dalam menentukan arah dan isi pembangunan. Oleh karena itu, strategi penguatan kapasitas LKD harus dirancang secara sistematis dan kontekstual, sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat (Arum, 2022).

Dalam upaya menjawab kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan penguatan kapasitas kelembagaan kepada anggota LKD di Desa Pamboborang. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pemahaman terhadap fungsi kelembagaan, penguatan peran dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa, serta pembentukan jejaring kolaborasi antara LKD, pemerintah desa, dan masyarakat (Hafizd et al, 2023). Adapun pendekatan yang digunakan adalah metode ceramah interaktif, yang dikemas dalam bentuk forum edukatif dan dialogis untuk mendorong pemahaman substantif dan pembelajaran partisipatif. Meskipun metode ceramah sering dianggap sebagai pendekatan konvensional, namun jika dirancang secara interaktif dan kontekstual, metode ini masih efektif dalam menyampaikan informasi dan membangun kesadaran kritis para peserta. Terlebih lagi, sebagian besar peserta merupakan aktor lokal yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam, sehingga dibutuhkan pendekatan penyampaian materi yang sederhana, sistematis, dan komunikatif. Adapun sasaran dari kegiatan ini mencakup tiga kelompok utama, yakni: 1) Anggota LKD, sebagai fokus utama intervensi yang diharapkan dapat menjalankan peran kelembagaan secara optimal; 2) Pemerintah Desa, sebagai mitra strategis dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan 3) Masyarakat Desa, sebagai bagian dari ekosistem sosial yang diharapkan mendukung dan mengawal keberlanjutan program-program pembangunan.

Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi akademik dan praksis dalam memperkuat kelembagaan desa, khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa berkelanjutan (Phahlevy, 2016). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-11 (kota dan pemukiman yang inklusif, aman, dan berkelanjutan) dan tujuan ke-16 (lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif). Secara akademik, kegiatan ini juga merefleksikan komitmen perguruan tinggi dalam mengaktualisasikan peran Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi antara akademisi dan masyarakat desa menjadi jembatan penting dalam mentransformasikan pengetahuan menjadi aksi nyata yang kontekstual dan solutif. Penguatan kapasitas LKD bukan hanya soal pengisian pengetahuan

teknis, tetapi juga proses pemberdayaan yang berkelanjutan dalam kerangka transformasi sosial yang lebih luas (Aziz et al, 2022).

Dalam konteks pengembangan keilmuan, kegiatan ini juga memperkaya wacana tentang penguatan tata kelola desa melalui pendekatan kelembagaan. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana desa, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, partisipasi masyarakat, serta kapasitas kelembagaan lokal dalam mengelola program secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, memperkuat kapasitas LKD merupakan langkah strategis dalam menciptakan desa yang tangguh, inovatif, dan mandiri. Melalui kegiatan ceramah interaktif ini, diharapkan terjadi proses pembelajaran bersama antara akademisi dan masyarakat desa, yang pada akhirnya melahirkan optimalisasi dalam tata kelola desa yang diharapkan dapat direplikasi di desa-desa lain dengan karakteristik sosial yang serupa, sehingga memperluas dampak positif dari kegiatan pengabdian ini secara lebih luas.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan metode diskusi interaktif yang disesuaikan dengan karakteristik peserta dan kondisi sosial kelembagaan di Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. metode diskusi merupakan suatu yang berkaitan erat dengan belajar mencari cara untuk memecahkan suatu masalah (problem solving), metode ini sering disebut dengan diskusi kelompok (Muhibbin Syah, 2004). Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Metode diskusi dipilih karena dinilai efektif untuk menyampaikan materi secara langsung dan sistematis, terutama kepada peserta dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Namun, untuk menghindari sifat satu arah yang biasanya melekat pada metode diskusi, kegiatan ini dirancang dalam format penyampaian materi dengan diskusi terbuka, simulasi ringan, dan sesi tanya jawab (Jannah et al, 2024).

Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam dua tahapan utama yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan, tim pengabdian terlebih dahulu melakukan observasi untuk mengidentifikasi kondisi sosial kelembagaan dan permasalahan aktual yang dihadapi LKD. Observasi ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder terkait struktur kelembagaan desa. Hasil dari tahap ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan diskusi, yang meliputi topik-topik seperti peran strategis LKD dalam pembangunan desa, pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga, sinergi antara LKD dengan pemerintah desa dan

masyarakat, serta peran kelembagaan lokal dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (Likubua et al, 2021).

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam satu hari dan terbagi menjadi dua sesi utama. Sesi pertama berfokus pada penyampaian materi inti oleh tim pengabdian melalui diskusi. Materi disampaikan secara sistematis dan komunikatif untuk menjangkau seluruh peserta. Sesi kedua berupa tanya jawab, di mana peserta diberi ruang untuk menyampaikan pengalaman, kendala kelembagaan yang dihadapi, serta usulan solusi lokal. Kegiatan ini bertujuan tidak hanya untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kritis dan partisipasi aktif dalam proses penguatan kelembagaan desa. Seluruh proses pelaksanaan kegiatan dijalankan dengan memperhatikan prinsip etika sosial dan penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Komunikasi dan koordinasi intensif dilakukan peserta kegiatan agar kegiatan tidak hanya mendapat legitimasi, tetapi juga menghasilkan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi penguatan kapasitas LKD di Desa Pamboborang.

3. HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul "*Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Mendukung Pembangunan Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang Berkelanjutan*" telah dilaksanakan secara langsung di Desa Pamboborang dalam suasana yang penuh partisipasi dan antusiasme dari seluruh pihak yang terlibat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam satu hari penuh dan bertempat di balai desa setempat, yang sebelumnya telah disepakati bersama antara tim pengabdian dan pemerintah desa. Kegiatan dihadiri oleh perangkat desa serta perwakilan Masyarakat yang mencerminkan besarnya perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan sebagai bagian dari proses pembangunan desa yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Kegiatan dimulai dengan penyampaian dari pihak perwakilan Desa Pamboborang yang secara eksplisit menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim pengabdian dari perguruan tinggi. Dalam penyampaiannya pihak Desa Pamboborang mengungkapkan bahwa salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa adalah lemahnya sinergi antar-lembaga desa serta terbatasnya pemahaman tentang peran kelembagaan dalam proses perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, kegiatan penguatan kapasitas ini dianggap sangat relevan dan strategis untuk memperbaiki pola kerja kelembagaan serta membangun koordinasi yang lebih efektif di tingkat desa.

4. DISKUSI

Kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan diskusi yang dilakukan oleh tim pengabdian. Materi disampaikan dalam format diskusi interaktif yang dikembangkan secara sistematis berdasarkan hasil observasi awal dan kajian terhadap kebutuhan lokal. Paparan dimulai dengan pengenalan konsep dasar tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) serta informasi mengenai lembaga-lembaga seperti LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Karang Taruna, dan lembaga adat, beserta fungsinya dalam mendukung kegiatan-kegiatan strategis desa. Salah satu topik utama yang dibahas dalam sesi diskusi adalah pentingnya partisipasi LKD dalam proses perencanaan pembangunan desa. Perwakilan Desa Pamboborang didorong untuk memahami bahwa peran penting yang dapat dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat dan menjembatani kepentingan publik dengan kebijakan desa. Materi ini disampaikan dengan menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Selama pemaparan, tim pengabdian juga mengangkat berbagai studi kasus yang bersumber dari contoh kegiatan-kegiatan di desa lainnya, terutama yang berhasil memposisikan LKD sebagai aktor penting dalam mengawal pembangunan berbasis komunitas. Studi kasus tersebut memicu diskusi yang cukup aktif dari peserta, yang mulai mengaitkan materi dengan kondisi riil di desa tersebut. Diskusi ini membuka ruang refleksi kritis yang pada akhirnya menumbuhkan semangat untuk memperkuat posisi LKD sebagai mitra strategis pemerintah desa yang memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam sistem pemerintahan desa. Setelah penyampaian informasi mengenai LKD, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka. Pada sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, maupun pengalaman terkait dengan praktik kelembagaan di lingkup kerja. Diskusi berlangsung dalam suasana yang cair dan partisipatif. Beberapa anggota LKD mengungkapkan kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kelembagaan, seperti kurangnya dukungan administratif dari pemerintah desa, belum tersedianya anggaran operasional, serta ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi yang membuat koordinasi antar-lembaga sering kali tumpang tindih. Menanggapi hal tersebut, tim pengabdian memberikan penjelasan normatif dan praktis mengenai pentingnya penyusunan dokumen kelembagaan, seperti SK Kepengurusan dan AD/ART, serta pentingnya penyusunan program kerja kelembagaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan desa. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Diskusi dengan perwakilan Desa Pamboborang.

Selain itu, muncul pula beberapa usulan dari peserta agar ke depan dilakukan pelatihan lanjutan yang lebih teknis, seperti pelatihan penyusunan proposal program LKD, manajemen keuangan lembaga, serta pelatihan advokasi kebijakan desa. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran baru dari para peserta untuk menjadikan LKD sebagai entitas yang aktif, adaptif, dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan desa. Kegiatan pengabdian ini juga memberikan dampak positif dalam membangun komunikasi yang lebih terbuka antara LKD dan pemerintah desa, yang selama ini cenderung berjalan secara sektoral. Kepala desa dan sekretaris desa yang turut hadir dalam diskusi ikut merespons berbagai pertanyaan peserta dengan sikap terbuka, dan bahkan menyampaikan komitmen untuk lebih melibatkan LKD dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program pembangunan desa.

Secara keseluruhan, kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Antusiasme peserta dapat terlihat dari keterlibatan selama diskusi berlangsung dan kesediaan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai. Suasana forum yang inklusif dan dialogis memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan secara sehat antara peserta dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu hal yang cukup mencolok adalah mulai tumbuhnya kesadaran kolektif di kalangan peserta mengenai pentingnya revitalisasi kelembagaan desa sebagai landasan dalam menciptakan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut tidak resmi dari kegiatan ini, beberapa anggota LKD secara spontan membentuk forum kecil untuk membicarakan rencana penyusunan program kerja kelembagaan yang akan diajukan dalam forum musyawarah desa mendatang. Hal ini merupakan sinyal positif bahwa pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dalam kegiatan tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi mulai diinternalisasi dalam bentuk

tindakan nyata di tingkat komunitas. Tim pengabdian memfasilitasi dengan memberikan contoh format sederhana penyusunan program kerja dan pembentukan struktur organisasi LKD yang berbasis partisipasi. Interaksi semacam ini menjadi indikasi kuat bahwa kegiatan pengabdian telah berhasil menciptakan ruang pembelajaran sosial yang bermakna dan berkelanjutan.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan LKD Desa Pamboborang memiliki landasan konseptual dan motivasional yang lebih kuat dalam menjalankan peran-perannya secara mandiri dan terstruktur. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya memperkuat fungsi internal LKD, tetapi juga memperluas dampaknya dalam mengawal akuntabilitas pembangunan desa, membangun sinergi lintas lembaga, serta memastikan bahwa arah pembangunan benar-benar berakar pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks jangka panjang, upaya seperti ini dapat menjadi model pemberdayaan kelembagaan yang dapat direplikasi di desa-desa lain, terutama di wilayah dengan tantangan serupa.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan fokus pada penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), telah memberikan kontribusi positif dalam membangun pemahaman kelembagaan serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran LKD dalam proses pembangunan desa yang berkelanjutan. Melalui metode ceramah interaktif yang dilaksanakan dalam suasana partisipatif, peserta yang terdiri dari anggota LKD, pemerintah desa, dan masyarakat memperoleh informasi dan wawasan baru mengenai fungsi kelembagaan, tata kelola desa yang partisipatif, serta pentingnya kolaborasi antar-lembaga untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan yang lebih efektif. Selama kegiatan berlangsung, terjadi dinamika diskusi yang konstruktif tetapi juga mulai mengkritisi kondisi kelembagaan yang ada di desa tersebut. Hal ini menjadi indikasi bahwa pendekatan ceramah yang disesuaikan dengan konteks lokal dapat menjadi sarana edukasi yang efektif, terutama jika dikemas secara dialogis dan mendorong refleksi partisipatif. Meskipun kegiatan ini berlangsung dalam waktu yang terbatas, dampak langsungnya dapat dilihat dari semangat peserta untuk membangun forum internal LKD serta komitmen dari pemerintah desa untuk memperkuat sinergi kelembagaan. Secara umum, kegiatan ini berhasil menciptakan ruang pembelajaran sosial yang inklusif, memperkuat hubungan antara elemen masyarakat, serta membuka jalan bagi penguatan kapasitas kelembagaan desa secara lebih terstruktur. Penguatan LKD merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan desa yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan lokal, tetapi juga berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

PENGAKUAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan, kerja sama, dan dedikasi dari berbagai pihak terhadap dukungan yang diberikan. Dukungan tersebut menjadi dasar penting bagi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program ini. Ucapan terima kasih yang mendalam juga disampaikan kepada Kepala Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, beserta seluruh perangkat desa dan anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang telah menerima tim dengan penuh keramahan dan berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Antusiasme dan keterbukaan mereka dalam berbagi pengalaman memberikan nilai tambah yang besar terhadap proses pembelajaran dan pencapaian tujuan kegiatan. Akhirnya, penghargaan disampaikan kepada seluruh anggota tim yang telah memberikan waktu, tenaga, dan gagasan selama persiapan hingga pelaksanaan kegiatan. Semoga kolaborasi ini menjadi inspirasi bagi upaya-upaya selanjutnya dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Arum, F. A. (2022). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam penerimaan bantuan desa. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2(1), 50–69. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2781>
- Asrizal, M., & Zulkarnain, D. (2020). Pelaksanaan tugas ketua rukun tetangga dalam membantu tugas kepala desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 192–201. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(2\).5969](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(2).5969)
- Aziz, K. A., Ghulam Manar, D., & Martini, R. (2022). Tata kelola desa wisata berbasis komunitas. *Journal of Politic and Government Studies*.
- Dwipayana, A., & Eko, S. (2003). *Membangun good governance di desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Fikri, D., et al. (2020). Penguatan partisipasi masyarakat melalui pembangunan. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 98–109. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i2.6558>
- Hafizd, J., Nurfalah, F. S., Ramadhan, M. A. P., Kaerudin, P., & Elok, K. (2023). Peran media sosial dalam penyampaian aspirasi masyarakat untuk perubahan yang lebih baik. *Strata Social and Humanities Studies*, 1(2), 147–155. <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.108>
- Jannah, S., Oktaviani, R., Qodie, A., & Hilqiya, M. (2024). Pemanfaatan teknologi guna mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan pelayanan. *Jurnal Sains Student Research*, 2(6), 111–119.
- Laksana, A. M., & Hamid, A. (2023). Implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 5 dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. *Kajian Ilmu Sosial*, 4(2), 83–92.

- Larisu, Z., & Jopang, J. (2022). Partisipasi masyarakat dalam mendukung optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa di Kabupaten Muna. *Sebatik*, 26(2), 622–629. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2050>
- Lathifah, L. N., Rustiadi, E., & Agusta, I. (2024). Analisis status perkembangan desa di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. *Tataloka*, 26(3), 165–179. <https://doi.org/10.14710/tataloka.26.3.165-179>
- Lestari, A., Naibaho, A., Ratnaningsih, D., Raharjo, N., Qomariah, & Hapsari, R. (2023). Bimbingan teknis desain kanopi balai pertemuan RT.03 RW.03 Bandulan Kota Malang. *Jurnal Abdiwangi*, 1(1), 9–20. <https://doi.org/10.57203/abdiwangi.v1i1.2023.9-20>
- Likubua, R., Fitra, N., & Saleh, A. (2021). Peranan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa. *MITZAL: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 6(1), 60–70. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v6i1.2076>
- Muhibbin Syah, (2004). Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Phahlevy, R. R. (2016). The concept of village autonomy in Indonesia. *Rechtsidee*, 3(1), 27. <https://doi.org/10.21070/jihr.v3i1.151>
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat. *Hulondalo: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 18–33. <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18>